



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SELASA, 28 AGUSTUS 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Laporan Realisasi DD/ADD Minim

TAIS, BE - Selain pemanfaatan aset bergerak yang banyak tak tepat sasaran. Ternyata aset non bergerak milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seluma, juga tak terjaga dengan baik. Aset berupa tanah milik Pemda Seluma, banyak dikuasai dan dikelola masyarakat.

"Memang banyak aset lahan kita yang sudah dimanfaatkan masyarakat ada 20

titik. Secepatnya, Pemda Seluma, memanggil camat, lurah dan pihak terkait untuk memastikan lahan pemda yang ditempati warga tersebut," tegas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat pemda Seluma, Nopetri Elmanto Msi kepada BE kemarin (27/8).

Bukti kepemilikan lahan yang dipegang Pemkab Seluma, atas 20 titik lahan itu

hanya berupa kepemilikan surat ganti rugi. Sebagian masih Surat keterangan Tanah (SKT). Walaupun ada yang sudah sertifikat masih atas nama masyarakat.

"Untuk 20 titik ini kita hanya memiliki surat ganti rugi. Nanti kita buat sertifikat atas nama pemkab secara bertahap, tetapi ada juga lahan yang sudah disertifikatkan atas nama pem-

da. Selain itu, ada juga yang masih SKT dan sertifikat atas nama masyarakat yang belum dibalik namakan," jelas Nopetri.

Lahan yang dikuasai warga itu, ada yang sudah didirikan bangunan semi permanen. Digunakan sebagai tempat usaha hingga tempat tinggal oleh masyarakat.

Diyakini aset yang ditempati warga bakal semakin

ambah jumlahnya. Ingat saat ini, baru sebagian kecil aset saja yang sudah didata.

Menyikapi aset yang dikuasai warga ini, Pemkab Seluma, bakal melakukan penertiban. Selain itu, Pemda Seluma juga mencabut izin pinjam pakai yang sudah dilakukan dan tidak memberikan izin pinjam pakai lahan lagi. Seperti lahan di

kawasan Simpang Enam, yang sebagian besar dipinjam pakaikan.

"Untuk penertiban aset yang sudah dimanfaatkan masyarakat. Nanti pemkab mengirimkan surat pemberitahuan permintaan pembongkaran. Jika tidak maka jelas Satpol PP pun dikerahkan untuk melakukan penertiban," sampainya.

Sebelum menerjunkan

Satpol PP, Pemda terlebih dahulu memberikan teguran pembongkaran sebanyak tiga kali. Dengan melibatkan lurah, camat dan satpol PP. Jika tetap membandel terpaksa penegak perda yang membongkar.

"Warga yang merasa menepati lahan pemda diminta pengertiannya dan mengindahkan untuk mengkosongkannya," harapnya. (333)